

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI, MEDIA DAN BUDAYA**

**M. Mansyur, Tina Kartika**

Universitas Lampung,

Email : [mansyurhebat@gmail.com](mailto:mansyurhebat@gmail.com) [tina.kartika@fisip.unila.ac.id](mailto:tina.kartika@fisip.unila.ac.id)

**Abstract**

This research uses content analysis method. This method discusses in depth the contents of written or printed information in mass media. Based on research and analysis conducted, I found that the Coronavirus Disease (Covid-19) prevention policy by the Four Regional Provinces was appropriate and contained a perspective of communication and cultural media in it.

**Keyword:** Coronavirus Disease, Government Policy, Communication, Culture

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode Content analisis. Metode ini membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, menemukan bahwa kebijakan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Empat Provinsi Daerah sudah tepat dan mengandung perspektif media komunikasi dan budaya didalamnya.

**Kata Kunci :** Coronavirus Disease, Kebijakan Pemerintah, Komunikasi, Budaya

**A. Pendahuluan**

Merujuk dari kondisi ditengah-tengah cengkraman kasus coronavirus disease atau sering kita kenal sebagai Covid-19 dan Corona Virus. Virus yang

awal mula di ketahuin menjangkit wilayah Provinsi Wuhan di China, saat ini menyebar keseluruh dunia hampir ke 168 Negara<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri virus ini tengah mewabah ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Berkenaan dengan kasus ini, segala bentuk pencegahan dari pemerintah mulai di sosialisasikan dan di maklumkan. Salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus ini, pemerintah mengenalkan istilah *Social Distancing* dan *Physical Distancing*.

*Social Distancing* adalah pembatasan sosial merupakan sebuah pembatasan yang membatasi kegiatan tertentu yang dilakukan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Tujuannya adalah Pemerintah Indonesia berharap agar dengan cara tersebut akan dapat mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Selain itu, pembatasan sosial penting dilakukan agar masyarakat mengurangi interaksi sosial dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun melakukan pembatasan penggunaan transportasi publik. Pembatasan sosial dalam hal ini untuk menjaga jarak fisik atau yang belakangan ini populer dengan istilah *Physical Distancing*<sup>2</sup>.

Untuk menekan penyebaran wabah virus ini, Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 untuk setiap daerah di Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional Non Alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian. Langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan

---

<sup>1</sup> Dandy Bayu Bramatasa, "Update Virus Corona Di Dunia," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed April 4, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/25/070100465/update-virus-corona-di-dunia--tembus-168-negara-107.247-semuh-18.612?page=all>.

<sup>2</sup> Olivia Shying, "What Is Physical Distancing? (Aka 'Social' Distancing)," *VicHealth*, last modified 2020, accessed April 4, 2020, <https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/what-is-physical-distancing>.

peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal.<sup>3</sup>

Hasil penelusuran dari berbagai media, bahwa ada beberapa langkah pencegahan yang diambil oleh kepala daerah terkait penularan Covid-19 dengan berbagai kebijakan strategi komunikasi yang dilakukan. Menariknya, sebelum pemerintah pusat memberikan himbauan pencegahan secara resmi, beberapa pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah tersebut diatas. Taktik pencegahan pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian Covid-19 telah dilakukan diantaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat.

Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sejak 13 Maret 2020. Sejalan dengan itu setiap kepala daerah juga diperintahkan untuk membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona di daerah masing-masing. Sejak dibentuknya gugus tugas penanganan virus corona hingga akhir bulan april 2020 telah dilakukan berbagai upaya penanganan penyebaran virus corona. Terkait dengan hal itu, ada pertanyaan yang muncul sebagai bahan pembahasan dalam tulisan ini, yaitu: apakah penanganan pandemi yang di lakukan oleh pemerintah daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah ini telah memperhatikan aspek komunikasi media dan budaya?.Atau, apakah aspek komunikasi media dan budaya dapat berperan dalam penyusunan strategi penangan covid-19 di Indonesia secara keseluruhan?

## Metode Penelitian

---

<sup>3</sup> “Virus Corona: Jokowi Umumkan Langkah Pengendalian Covid-19, Tapi Tanpa ‘Komando Nasional,’” *BBC News*, last modified 2020, accessed May 10, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51897307>.

Penelitian ini menggunakan metode Content analysis. Metode ini membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi mengenai analisis Isi. Analisis isi secara umum dapat diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi disisi lain analisis isi juga digunakan dalam mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis.<sup>4</sup>

## **B. Temuan dan Pembahasan**

11 hari setelah mengumumkan pasien pertama positif corona di Indonesia, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas. Maka sejak saat itu segenap langkah penanggulangan mulai direncanakan dalam skala nasional. Untuk memperkuat Gugus Tugas tersebut, pada 20 Maret 2020 Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang merevisi Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Dengan Keppres baru tersebut Gubernur di seluruh Indonesia berwenang memberikan arahan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanganan kasus covid-19 di daerahnya masing-masing.<sup>5</sup>

Kenyataan dilapangan, sebelum pemerintah pusat menetapkan Status Indonesia darurat nasional, ada beberapa langkah pencegahan yang diambil lebih

---

<sup>4</sup> Ole R. Holsti, "Content Analysis for the Social Sciences and Humanities," *qusetia* (1969), <https://www.questia.com/library/7260038/content-analysis-for-the-social-sciences-and-humanities>.

<sup>5</sup> Febby Febriyandi YS, "Penanganan Wabah Covid-19 Dengan Pendekatan Budaya," last modified 2020, accessed May 5, 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>.

terapkan oleh kepala daerah . Taktik pencegahan pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian Covid-19 telah dilakukan diantaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat.

### 1. Langkah Pencegahan Gubernur DKI Jakarta

Dalam proses penanggulangan pandemi covid-19 di Indonesia pemerintah DKI Jakarta menjadi pihak pertama yang membentuk Tim Tanggap Covid-19. Tim ini dibentuk oleh Gubernur DKI pada 2 Maret 2020, di hari yang sama pengumuman pasien positif corona pertama oleh presiden Joko Widodo.<sup>6</sup> Kebijakan ini masuk akal karena DKI merupakan kota terbesar, terpadat, memiliki akses paling luas dan merupakan kota paling penting di Indonesia, sehingga makin cepat penanganan yang dilakukan akan semakin baik bagi kepentingan nasional. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, Gubernur Anis Baswedan memutuskan untuk meniadakan hari bebas kendaraan (Car free day) yang biasa dilakukan pada setiap hari minggu di beberapa jalanan protokol di Jakarta.<sup>7</sup> Peniadaan ini akan berlangsung dalam dua minggu dan akan dievaluasi lagi hingga beberapa saat ke depan. Beliau juga menghimbau kepada warga Jakarta untuk melakukan yang biasa disebut sebagai *social distancing measure*, yaitu menjaga jarak antar warga. Mengurangi pertemuan, menghindari kontak fisik, menjauhi tempat-tempat berkumpul orang banyak. Karena penularan virus *corona* terjadi karena interaksi dari orang ke orang.

Anies pun menghimpun pencegahan penyebaran Virus dalam 7 Himbauan antara lain : *Pertama*, jangan keluar rumah kecuali amat penting. Sebisa mungkin kerjakan pertemuan secara jarak jauh. *Kedua*, hindari tempat-

---

<sup>6</sup> “136 Suspect Corona, Anies Bentuk Tim Tanggap Covid-19,” *CNBC Indonesia*, last modified 2020, accessed May 10, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302131947-4-141711/136-suspect-corona-anies-bentuk-tim-tanggap-covid-19>.

<sup>7</sup> Arief Ikhsanudin, “Cegah Corona, Anies Tiadakan Car Free Day 2 Minggu Ke Depan,” *Detik News*, accessed May 6, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4934018/cegah-corona-anies-tiadakan-car-free-day-2-minggu-ke-depan>.

tempat yang berpotensi jadi wahana penularan. Misalnya kegiatan yang berdirinya, duduknya, saling berdekatan. *Ketiga*, tunda semua kegiatan pengumpulan orang banyak. Walaupun kegiatannya mulia baik dan dirasa perlu, tapi jika tidak urgen maka tunda saja. *Keempat*, terkait dengan kegiatan keagamaan, dalam kondisi seperti ini lakukan kegiatan di rumah saja. Tunda semua kegiatan yang sifatnya bersama-sama sampai penularan Covid 19 telah terkendali dengan baik. *Kelima*, tunda kegiatan resepsi. Jika resepsi pernikahan memang harus dilaksanakan maka penyelenggara harus melakukan langkah tegas dan disiplin, seperti menyediakan *hand sanitizer* dan menghindari jabat tangan. *Keenam*, Ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, ditiadakannya perkuliahan di kampus, Tujuannya adalah agar semua kita bisa berada di rumah. *Ketujuh*, Anies berpesan kepada semua usahakan tidak bepergian ke luar kota. Tunda rencana pulang kampung sampai kondisi penularan terkendali. Jangan sampai ada di antara kita yang pulang kampung dan tanpa disadari justru membawa virus tersebut ke kampung halaman atau ke wilayah lain. Karena Jakarta saat ini merupakan salah satu tempat di mana virus tersebut telah menular dari satu pribadi ke pribadi lain.<sup>8</sup>

## **2. Langkah Pencegahan Gubernur Jawa Barat**

Langkah Taktis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa barat adalah merumahkan siswa dan menghentikan kegiatan massal. Pada awal Februari Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat berstatus siaga satu, kemudian membangun pusat Informasi dan koordinasi Covid-19 Jawa barat yang bisa diakses oleh warga. Jawa Barat berinisiatif melakukan tes proaktif atau pemeriksaan sample akan diperiksa di laboratorium kesehatan Jawa-Barat, bekerja sama laboratorium mikrobiologi dan parasitologi Fakultas Kedokteran

---

<sup>8</sup> Yustinus Paat, "Hindari Virus Corona, Anies Keluarkan 7 Imbauan," *Berita Satu*, last modified 2020, accessed May 5, 2020, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/608945-hindari-virus-corona-anies-keluarkan-7-imbauan>.

UNPAD dan Pusat penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB dengan standar WHO Biosafety Level 2.<sup>9</sup>

Langkah Gubernur Jawa Barat dalam menangani penyebaran wabah ini diapresiasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian. Karena pemerintah Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sejak awal, antisipasi awal dilakukan kesiapan jika suatu saat COVID-19 merebak ke wilayah Jawa Barat. Penyiapan pencegahan untuk kemungkinan jangka panjangpun disiapkan, langkah-langkah mitigasi termasuk edukasi dan juga kedepan seandainya terjadi lonjakan, pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan Rumah Sakit, tenaga medis, ruang isolasi, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Kementerian dalam Negeri juga menambahkan dirinya semakin kagum dengan *command center* di Jawa Barat yang sudah terbentuk. Secara umum Command Center merupakan sebuah lokasi atau tempat penyedia kendali, koordinasi, dan pembuatan keputusan. Command Center diibaratkan sebagai sebuah pusat komando atau sering disebut "Ruang Perang" (War Room), karena dari ruangan Command Centre tersebut, seluruh hal yang terpantau dari sistem bisa terkontrol, termonitor, dan dapat digunakan sebagai dasar informasi dalam mengambil keputusan oleh berbagai pihak. Command Center atau Control Center / Operation Control Center (OCC) juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menugaskan serta mengendalikan tim atau personel, dan secara langsung dan "real-time" memantau jalannya aktivitas yang dilakukan tersebut dari ruangan yang sama secara cepat dan efektif.

---

<sup>9</sup> Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia," *Salam* 7, no. 3 (2020): 247–260, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15103>.

<sup>10</sup> Gilar Ramdhani, "Mendagri Apresiasi Gubernur Jabar Atas Langkah Penanganan COVID-19," *Liputan6*, last modified 2020, accessed May 7, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4205675/mendagri-apresiasi-gubernur-jabar-atas-langkah-penanganan-covid-19>.

Oleh karena itu, sudah banyak badan, lembaga dan institusi pemerintah, serta organisasi di negara-negara besar yang menggunakan Command Centre, sebagai pusat pengendali aktivitas dan operasionalnya, untuk mempermudah pengendalian seluruh aspek badan, lembaga, institusi, dan organisasi, dan mempersingkat waktu untuk decision making, deployment dan feedback.<sup>11</sup>

### **3. Langkah Pencegahan Gubernur Jawa Timur**

Mewabahnya virus Corona di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini demi mencegah penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease (COVID-19). Gubernur Khofifah juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Covid 19 dengan mengambil enam bidang kebijakan untuk percepatan penanganan virus tersebut, hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Enam bidang kebijakan yang di pilih adalah : Pertama, dalam bidang perhubungan. Ia mengatakan kepada para Bupati/Wali Kota menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun serta menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi thermal gun dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek, dan demam. Fasilitas itu wajib dilengkapi di setiap terminal, bandara, stasiun, atau pelabuhan sesuai dengan kewenangannya. Kedua, didalam dunia pendidikan, ia telah menegaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMA, SMK, dan PK-LK di Jawa Timur dilakukan di rumah peserta didik masing-masing dengan memberikan tugas yang akan dinilai pada saat masuk sekolah. Ketiga, di bidang kesehatan, Khofifah menghimbau bupati/wali kota untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes untuk melakukan pemantauan orang-orang yang datang dari

---

<sup>11</sup> "Kebutuhan Command Centre Di Indonesia," *Kominfo Kabupaten Badung*, last modified 2020, accessed May 8, 2020, <https://badungkab.go.id/instansi/diskominfo/baca-artikel/89/Kebutuhan-Command-Centre-di-Indonesia.html>.



negara/wilayah terjangkit karena termasuk ODR atau Orang Dengan Resiko. Keempat, di bidang pemerintahan, ia menyatakan pada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kebersihan dan menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Kelima, dari sektor ekonomi, Gubernur menghimbau kepada bupati/wali kota dan penyelenggara kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Terakhir, keenam yaitu bidang informasi dan komunikasi untuk menyediakan Call Center yang terintegrasi dengan nomor 1500117<sup>12</sup>

#### 4. Langkah Pencegahan Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus Corona (Covid-19). Surat Edaran yang berisi Empat imbauan tersebut ditujukan kepada bupati atau wali kota, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal serta seluruh Pimpinan BUMN di Jawa Tengah. Surat Edaran bernomor 440/0005942 tersebut menyangkut Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus 055455 (Covid-19) di Jawa Tengah. Dalam surat tersebut, Ganjar menyampaikan diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian melalui empat langkah.

Adapun ke empat kebijakan yang di ambil antara lain: Pertama, Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai kewenangannya. Kedua, Ganjar menyampaikan agar seluruh instansi melakukan pencegahan sedini mungkin, dengan menyediakan berbagai peralatan dan kebutuhan pengecek kondisi tubuh. Ketiga, Ganjar juga menginstruksikan agar dilakukan penundaan atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak

---

<sup>12</sup> Aditya, "Gubernur Jawa Timur Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Dan Penyebaran Covid 19," *Headline.Co.Id*, last modified 2020, accessed May 6, 2020, <https://www.headline.co.id/5816/gubernur-jawa-timur-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-dan-penyebaran-covid-19/>.

pada tempat tempat umum. Seperti *car free day*, berkemah, *study tour*, dan sebagainya. Dan terakhir yang ke empat, membentuk posko informasi terpadu di masing-masing instansi. Informasi terpadu yang disiapkan adalah membuka layanan pengaduan dan penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui nomor telepon (024) 3580713.<sup>13</sup>

### **C. Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Komunikasi media dan Budaya**

Dari hasil temuan data dan fakta melalui beberapa sumber literasi media, langkah kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki beberapa kesamaan taktis. Lain dari itu menariknya mereka mengambil langkah pencegahan sebelum ada instruksi resmi dari Presiden Jokowi. Yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan lebih awal adalah instruksi pusat dinilai lebih lambat, bahkan bisa dikatakan tidak adanya komando nasional padahal WHO sendiri telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi. Kementerian kesehatan menjelaskan Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang.<sup>14</sup> Pada akhirnya Pemerintah Indonesia menetapkan merebaknya wabah ini sebagai Bencana Nasional sebelum ke empat pemerintah provinsi diatas lebih dulu melakukan pencegahan. Kejadian ini tentunya harus bisa diambil pelajaran oleh kabupaten dan kota yang lain. Kebijakan pencegahan yang dilakukan pemerintah Jakarta misalnya, menggunakan teknik pencegahan Komunikasi Koersif lebih dominan dibanding yang lainnya. Teknik Komunikasi dan Medianya adalah berupa sebuah instruksi untuk berjaga jarak sosial seperti menutup Car Free Day, meliburkan sekolah

<sup>13</sup> Bidang Ikp, "Hadapi Corona, Ini 4 Perintah Ganjar Kepada Bupati Dan Wali Kota," *Jatengprov*, last modified 2020, accessed May 6, 2020, <https://jatengprov.go.id/publik/hadapi-corona-ini-4-perintah-ganjar-kepada-bupati-dan-wali-kota/>.

<sup>14</sup> Dina Rahmawati, "Pandemi Corona Virus Gelombang Kedua, Mungkinkah Terjadi?," *Sehatq*, last modified 2020, accessed May 6, 2020, <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>.

sementara waktu dan menghindari kerumunan. Perumusan kebijakan lain Anies menuangkan dalam Tujuh Himbauan yang di sosialisasikan di berbagai media komunikasi baik cetak, online, televisi dan radio.

Penanganan penyebaran wabah ini tidak bisa hanya melalui pendekatan medis dan kesehatan saja. Hal ini karena wabah penyakit dan aspek sosial-budaya tidak dapat di pisahkan. Disatu sisi, penyakit bisa muncul karena adanya penyimpangan budaya ( cara hidup manusia ) yang tidak sesuai dengan norma kesehatan. Saat ini, Covid-19 di tularkan melalui salah satunya adalah adanya kontak jarak dekat atau kontak fisik langsung antara orang yang terinfeksi dengan yang tidak. Karena itu, bentuk tradisi masyarakat Jakarta yang mengandung perkumpulan ramai seperti acara pesta pernikahan, seminar dan lain lain untuk ditiadakan sementara waktu. Bukan tidak mungkin setelah wabah ini berakhir, warga Jakarta akan menemukan budaya baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

Dalam perspektif budaya dalam pencegahan yang di terapkan oleh Gubernur Jawa Barat sama halnya dengan Pemerintah Provinsi Jakarta. Pemprov Jawa Barat juga melakukan instruksi yang sama yakni meniadakan Car free day dan menginstruksikan untuk melakukan social distancing, menutup tempat-tempat rekreasi, dan klub-klub sebagai tempat berkumpulnya orang. Selain itu juga meliburkan sekolah dan Universitas, dan menginstruksikan untuk untuk bekerja di rumah. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kota setempat baik walikota dan camat serta Lurah untuk mensosialisasikan kepada warganya untuk tidak meninggalkan rumah. Strategi komunikasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat juga banyak melakukan teknik Koersif berupa instruksi dan juga pesan edukatif. Dalam hal pendekatan media dan komunikasi, Gubernur Jawa Barat menyediakan ruang publik berbasis Online guna menampung laporan dan pengaduan warga terkait Covid-19 melalui Command Centre yaitu <https://covid19.bandung.go.id/>.

Di Jawa Timur sendiri Gubernur Khofifah juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Covid 19 dengan mengambil enam bidang kebijakan meliputi bidang perhubungan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang komunikasi informasi. Ke enam bidang ini dipandang efektif dalam pencegahannya dan erat kaitannya dengan pendekatan komunikasi dan budaya di masyarakat. Langkah Provinsi Jawa Timur juga lebih banyak menggunakan strategi Koersif, berupa instruksi dan sosialisasi. Ini berarti strategi komunikasi yang dilakukan juga berupa teknik informatif dan edukatif, Strategi canalizing juga menjadi dominan agar pesan dalam pencegahan penularan Covid-19 dapat bersama-sama dilakukan Khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur. Dalam kaitannya dengan media komunikasi, Bidang informasi dan komunikasi Jawa Timur telah mengimplementasikannya dalam penyediaan layanan Call Center yang terintegrasi dengan nomor 1500117, 081334367800 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur), dan 08124922279 (RSUD Dr. Soetomo).

Terakhir adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan strategi komunikasi Koersif berupa Instruksi dan aksi penutupan beberapa tempat kegiatan yang memungkinkan banyak mengumpulkan orang seperti car free day dan juga meliburkan sekolah-sekolah dan tempat-tempat pertunjukan pentas seni yang bisa dipentaskan rutin. Melakukan strategi komunikasi canalizing ketika mengumpulkan pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan kerjasama dalam pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya. Selain strategi komunikasi koersif, pemerintah Pemprov Jawa Tengah juga menggunakan teknik canalizing dan juga informatif dan edukatif, untuk memberikan pemahaman yang sama dengan pemerintah kota dan jajarannya yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penutupan segala kegiatan baik kegiatan belajar mengajar, tempat-tempat wisata dan juga memberikan informasi melalui pusat layanan informasi

untuk memberikan informasi sekaligus edukasi masyarakat terkait pencegahan penularan Virus Covid-19 di lingkungannya.

Selain itu melalui Surat Edaran bernomor 440 /0005942 tersebut menyangkut Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus 055455 (Covid-19) di Jawa Tengah. Dalam surat edrannya, Ganjar menyampaikan diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian melalui empat langkah yang sudah di jelaskan dalam fakta diatas. Dari keempat kebijakan yang di ambil, sama halnya dengan pemerintah provinsi lainnya, yaitu menghentikan sementara budaya untuk berkerumun dan membatasi jarak sosial. Kemudian dalam perspektif media dan komunikasi, pemerintah Jawa Tengah membuka layanan Informasi terpadu yang disiapkan adalah membuka layanan pengaduan dan penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui nomor telepon (024) 3580713.

Dari hasil analisis diatas jika ditinjau dari segi komunikasi media, revolusi industri 4.0 sangat berperan dalam melakukan inisiatif terbaru guna memaksimalkan fungsi komunikasi, tukar informasi, dan pengetahuan melalui teknologi virtual dan digital. Berkaitan dengan hal itu, media berbasis *Online* yang di lakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sudah membawa kedalam budaya baru. Antara lain budaya interaksi langsung yang kemudian berubah secara Daring ( Dalam Jaringan).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa benar internet menjadi new media yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia<sup>15</sup>. Secara sederhana new media berasal dari kata “new” yang berarti baru dan “media” yang berarti alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.<sup>16</sup> Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena internet menyediakan aplikasi yang

---

<sup>15</sup> James Rianto Situmorang, “Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya,” *Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2012): 73–87, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/418>.

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

sangat beragam yang memungkinkan orang melakukan bermacam kegiatan di Internet, sebut saja situs jejaring sosial, situs berbagi video, game online, blog, bisnis online, konferensi video, e-books, koran online, forum chatting online, milis dan lain sebagainya. Pemanfaatan yang dimaksud dalam cakupan ini adalah dari ke empat pemerintah diatas, semua melakukan tradisi komunikasi interaktif informatif melalui internet dengan membuka layanan pegaduan dan laporan di website. Fenomena Pandemi Covid 19 ini nampaknya telah membentuk sebuah kebiasaan baru di dunia komunikasi media, antara lain adalah berlangsungnya alternatif informasi dan layanan secara *online*.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh ke empat pemerintah diatas juga adalah erat kaitannya dengan budaya. Dalam hal ini saya menganalisis dengan mempertimbangkan aspek budaya. Dalam langkah penanggulangan covid-19 yang saat ini dilakukan, pemerintah telah memperhatikan aspek budaya lingkungan sosial. Namun apa yang dilakukan belum memanfaatkan potensi budaya secara maksimal. Di satu sisi, himbauan isolasi diri ini ditambah dengan informasi tentang cara penyebaran virus dengan melakukan kontak dengan orang lain justru berpotensi menjadikan masyarakat memiliki sifat anti sosial, paling tidak untuk sementara waktu. Karena budaya paling melekat di tubuh warga Indonesia saat ini adalah “budaya Ramah Tamah” dengan konsep interaksi langsung, saling berjabat tangan, senyum dan sapa. Dengan mengisolasi diri, meskipun di rumah, sesama anggota masyarakat berkemungkinan tidak mengetahui kondisi para tetangganya, apakah mereka sehat, atau apakah mereka makan atau tidak. Apalagi jika keadaan makin memburuk, sifat alamiah manusia untuk bertahan hidup akan mendorong menguatnya sikap egoisme. Seorang Sosiolog Inggris, Herbert Spencer pernah mengatakan bahwa untuk bertahan dalam kondisi yang berat atau kejam, manusia membutuhkan sikap egois untuk memungkinkannya bertahan hidup. Sikap egois memungkinkan “*the survival of the*

*fittest*'.<sup>17</sup> Dalam kasus ini, beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan penanganan dengan tidak menghilangkan bidang kesejahteraan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah.

Dilain keadaan, jika kemungkinan akan adanya kekacauan sosial karena manusia mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak lagi peduli dengan kesulitan atau penderitaan orang lain. Meskipun pandangan Spencer ini banyak juga dibantah oleh filsuf lain yang berpendapat bahwa manusia bertahan hidup dengan azas altruisme (mengutamakan kepentingan bersama), namun hemat saya, dengan kondisi masyarakat yang sangat kapitalistik saat ini, dimana hak kepemilikan pribadi sangat besar, pendapat Spencer lebih mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi pemerintah dapat membuat sejumlah kebijakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai ujung tombak. Kebijakan itu antara lain :

Membuat materi kampanye berbasis budaya lokal, tetapi bukan sebatas konten seni tradisi seperti yang sudah ada saat ini. Materi budaya yang digunakan mestinya adalah memori lokal mengenai wabah, yang boleh jadi tersimpan dalam cerita rakyat, nyanyian dan sebagainya, sehingga masyarakat langsung memahami dampak yang akan ditimbulkan. Penggunaan memori kolektif ini menjadi penting karena pada dasarnya manusia mudah digerakkan apabila memiliki memori kolektif yang relatif sama. Selain itu, manusia bertindak sesuai dengan basis pengetahuannya, dan pengetahuan manusia disusun oleh beberapa unsur yaitu : persepsi, apersepsi, pengamatan, konsep serta fantasi. Oleh karena itu, jika pemerintah mampu menstimulasi lahirnya apersepsi dan fantasi yang sesuai, saya kira himbauan mengenai *social* atau *physical distancing* akan lebih dipatuhi oleh masyarakat, tanpa perlu menggunakan tekanan. Melibatkan pemimpin adat, atau agensi lokal lainnya dalam melakukan kampanye penanganan covid-19. Pelibatan aktor-aktor lokal ini akan membawa dampak yang cukup signifikan karena himbauan berasal dari kalangan sendiri sehingga lebih didengar. Pemerintah

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Kabupaten juga dapat membuat atau mengaktifkan posko-posko kesehatan dilingkungan terkecil.

Apabila diperlukan, pemerintah dapat menstimulus lahirnya aturan adat atau aturan desa yang bertujuan mensukseskan penanganan dan pencegahan covid-19. Dalam banyak masyarakat, aturan adat atau peraturan desa kadangkala lebih dipatuhi dari pada himbauan pemerintah. Hal ini dikarenakan aturan adat dan desa dirasakan lebih “dekat” dari pada peraturan pemerintah.

Membentuk lumbung pangan warga. Mengingat bahwa pandemi melumpuhkan sektor ekonomi, maka perlu difikirkan suatu sistem pengaman pangan. Paling tidak, ada skema yang menjamin bahwa kecukupan pangan bagi masyarakat kelas bawahsemasa pandemiakan terpenuhi. Karl Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation: The Political and Social Origins of Our Time* (1944), menyebutkan bahwa masyarakat yang masih hidup dalam sistem kesukuan memiliki suatu skema jaminan ekonomi yang disebut redistribusi. Skema ini dapat kita terapkan untuk menghadapi wabah saat ini. Pemerintah dapat memerintahkan setiap Rukun Warga membentuk Tim Lumbung Pangan Warga yang bertugas mengumpulkan sumbangan atau iuran bahan pangan yang akandidistribusikan kembali kepada masyarakat saat kelangkaan bahan pangan terjadi pada masa wabah. Jika skema ini dikelola dengan baik, ketahanan pangan pada masa pandemi akan terjaga, dan ini akan berbanding lurus dengan pencegahan tindak penjarahan serta kerusuhan sosial.<sup>18</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dari beberapa kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah kebijakan dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing-masing daerah dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 sudah tepat, akan tetapi lambannya pemerintah pusat dalam mengambil komando sangat

---

<sup>18</sup> YS, “Penanganan Wabah Covid-19 Dengan Pendekatan Budaya.”



disayangkan. Peran pemerintah pusat saat ini seolah-olah hanya melakukan beberapa strategi komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun daerah mestinya segera menyusun rencana dan tatalaksana penanganan covid-19 yang menjadikan aspek Komunikasi dan Budaya sebagai ujung tombak. Karena, jika keadaan makin memburuk dan pelampung ekonomi warga sudah tenggelam, maka kekacauan sosial hanya akan dapat diredakan lewat usaha-usaha represif yang beresiko memakan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. "Gubernur Jawa Timur Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Dan Penyebaran Covid 19." *Headline.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed May 6, 2020. <https://www.headline.co.id/5816/gubernur-jawa-timur-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-dan-penyebaran-covid-19/>.
- Bramatasa, Dandy Bayu. "Update Virus Corona Di Dunia." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed April 4, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/25/070100465/update-virus-corona-di-dunia--tembus-168-negara-107.247-sem-buh-18.612?page=all>.
- Holsti, Ole R. "Content Analysis for the Social Sciences and Humanities." *questia* (1969). <https://www.questia.com/library/7260038/content-analysis-for-the-social-sciences-and-humanities>.
- Ikhsanudin, Arief. "Cegah Corona, Anies Tiadakan Car Free Day 2 Minggu Ke Depan." *Detik News*. Accessed May 6, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4934018/cegah-corona-anies-tiadakan-car-free-day-2-minggu-ke-depan>.

- Ikp, Bidang. "Hadapi Corona, Ini 4 Perintah Ganjar Kepada Bupati Dan Wali Kota." *Jatengprov*. Last modified 2020. Accessed May 6, 2020.  
<https://jatengprov.go.id/publik/hadapi-corona-ini-4-perintah-ganjar-kepada-bupati-dan-wali-kota/>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Paat, Yustinus. "Hindari Virus Corona, Anies Keluarkan 7 Imbauan." *Berita Satu*. Last modified 2020. Accessed May 5, 2020.  
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/608945-hindari-virus-corona-anies-keluarkan-7-imbauan>.
- Rahmawati, Dina. "Pandemi Corona Virus Gelombang Kedua, Mungkinkah Terjadi?" *Sehatq*. Last modified 2020. Accessed May 6, 2020.  
<https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>.
- Ramdhani, Gilar. "Mendagri Apresiasi Gubernur Jabar Atas Langkah Penanganan COVID-19." *Liputan6*. Last modified 2020. Accessed May 7, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4205675/mendagri-apresiasi-gubernur-jabar-atas-langkah-penanganan-covid-19>.
- Shying, Olivia. "What Is Physical Distancing? (Aka 'Social' Distancing)." *VicHealth*. Last modified 2020. Accessed April 4, 2020.  
<https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/what-is-physical-distancing>.
- Situmorang, James Rianto. "Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya." *Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2012): 73–87.  
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/418>.
- YS, Febby Febriyandi. "Penanganan Wabah Covid-19 Dengan Pendekatan

Budaya.” Last modified 2020. Accessed May 5, 2020.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>.

Zahrotunnimah. “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia.” *Salam* 7, no. 3 (2020): 247–260. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15103>.

“136 Suspect Corona, Anies Bentuk Tim Tanggap Covid-19.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. Accessed May 10, 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302131947-4-141711/136-suspect-corona-anies-bentuk-tim-tanggap-covid-19>.

“Kebutuhan Command Centre Di Indonesia.” *Kominfo Kabupaten Badung*. Last modified 2020. Accessed May 8, 2020.

<https://badungkab.go.id/instansi/diskominfo/baca-artikel/89/Kebutuhan-Command-Centre-di-Indonesia.html>.

“Virus Corona: Jokowi Umumkan Langkah Pengendalian Covid-19, Tapi Tanpa ‘Komando Nasional.’” *BBC News*. Last modified 2020. Accessed May 10, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51897307>.

